

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017.

LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ranai, 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

A circular official stamp of the Kabupaten Natuna Fisheries Office. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA" around the top and "DINAS PERIKANAN" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

**SUHERMAN, SH
NIP. 19720317 200012 1 002**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Capaian Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna diperhitungkan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 yang mana total anggaran belanja sebesar Rp. 20.936.747.658,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam



Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Untuk Pelaksanaan dan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 mengalokasikan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 16,010,401,400,- (Enam Belas Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah). Adapun untuk belanja penunjang atau Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk Tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp. 4.926.346.258,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Secara umum 3 (tiga) sasaran strategis yang tercakup dalam 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2017 dapat dicapai hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala dinas) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Dinas Perikanan kabupaten Natuna untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2017. Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna tahun 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 16,010,401,400,-. Dikaitkan dengan pencapaian sasaran yaitu Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan menyerap anggaran yakni Rp. 10.411.924.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.727.177.621,- atau 93,42 %, Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan menyerap anggaran yakni Rp. 287.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.604.673,- atau 95,80 %, dan Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi menyerap anggaran yakni Rp. 5.310.777.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.705.291.059,- atau 88,60 %. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam perbaikan pelayanan publik di tahun

yang akan datang. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun 2017, maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 berhasil dengan predikat memuaskan. Untuk waktu yang akan datang, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna akan terus melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur, memaksimalkan anggaran berbasis kinerja.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
1.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN	7
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMD TAHUN 2016 -2021	16
2.2. RENCANA STRATEGIS	18
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
2.4. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
3.2. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
TABEL.I.1. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017	8
TABEL.II.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	21
TABEL.II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	22
TABEL.II.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017	23
TABEL.II.4. ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017	25
TABEL.III.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN BERDASARKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017	34
TABEL.III.2. ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN DANA BERDASARKAN MISI DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2017	38
TABEL.IV.1. TINGKAT KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN LAPORAN ALIRAN KAS (CASH FLOW) TAHUN ANGGARAN 2017	42
TABEL.IV.2. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN MISI DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017	43



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

HALAMAN

GAMBAR.I.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUN	15
--	----



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

HALAMAN

GRAFIK.I.1. GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017	12
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	46
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN.....	47
3. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2017 DINAS PERIKANAN	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep *goodgovernance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stake holder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2017 dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,



- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Natuna Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 - 2021, dan setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna tersebut.

Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan;

2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, dan
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

a. Dasar Pembentukan

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan ini Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Tugas pokok yang diemban Dinas Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan Kewenangan Otonomi dibidang Kelautan dan Perikanan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perikanan;

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan.

d. Kewenangan

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
2. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten;
3. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
5. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
6. Pembinaan pemukiman nelayan;
7. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana Perikanan;
8. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
9. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;
10. Pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan Kabupaten;
11. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
13. Penyusunan Rencana Bidang Kelautan dan Perikanan;

14. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi;
16. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan Perikanan;
17. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
18. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
19. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap Illegal Fishing.

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Susunan organisasi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
 - c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil
4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI
 - c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI

5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya :
 - a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan
 - c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didukung Oleh sumber daya manusia dengan jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 94 Orang, termasuk pegawai UPTD di Kecamatan dengan rincian terdiri dari : 5 Orang Gol IV, 23 Orang Gol III, 28 Orang Gol II, 38 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari Tabel I.1 dan sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Grafik I.1 serta Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar I.1.

TABEL I.1.
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)				(5)						
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-



	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	5	2	-	-
	d. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	3	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-



	b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	1	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kepala UPTD Balai Benih Perikanan Pantai (BBIP)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha BBIP	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	b. Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknis	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	c. Kasubsi Standarisasi dan Informasi	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
7.	Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bunguran Timur	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
8.	Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-



	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-
9.	Kepala UPT Dinas Kelautan Perikanan Kecamatan Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
10.	Kepala UPT Dinas Kelautan Perikanan Kecamatan Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11.	Kepala UPT Dinas Pelabuhan Kelautan Perikanan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12.	Kepala UPT Dinas Kelautan Perikanan Kecamatan Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13.	Kepala UPT Dinas Kelautan Perikanan Kecamatan Subi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	-	-	-

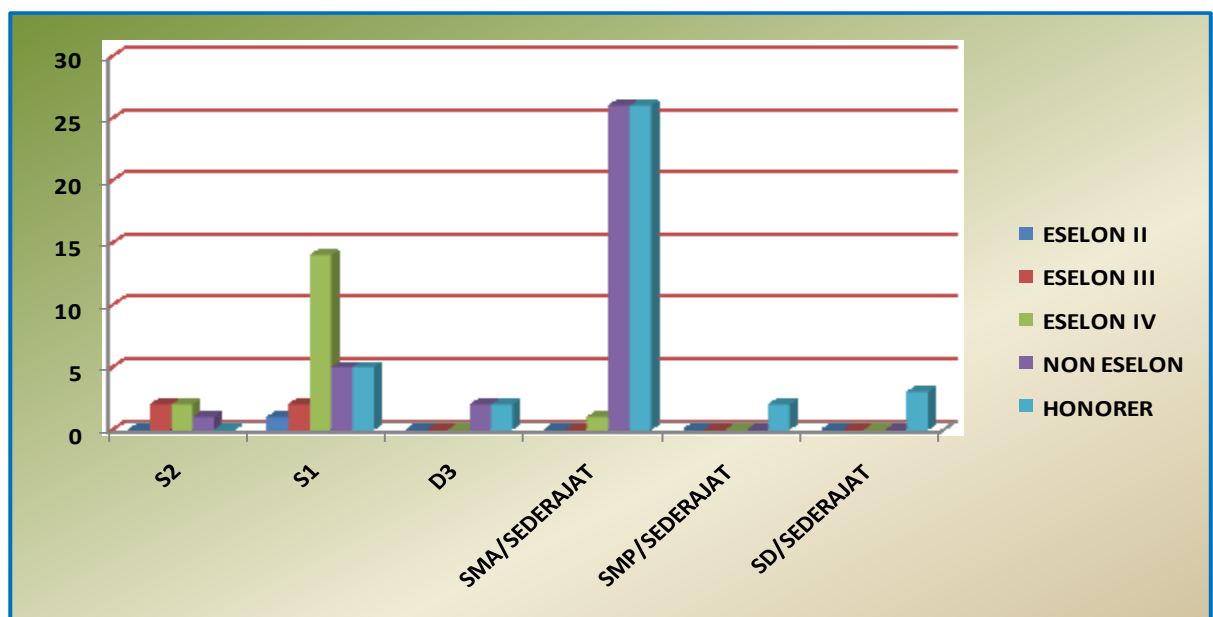


	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
14.	Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15.	Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Midai	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	c. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Petugas Fungsional (Penyuluh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

GRAFIK I.1.

GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017



Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

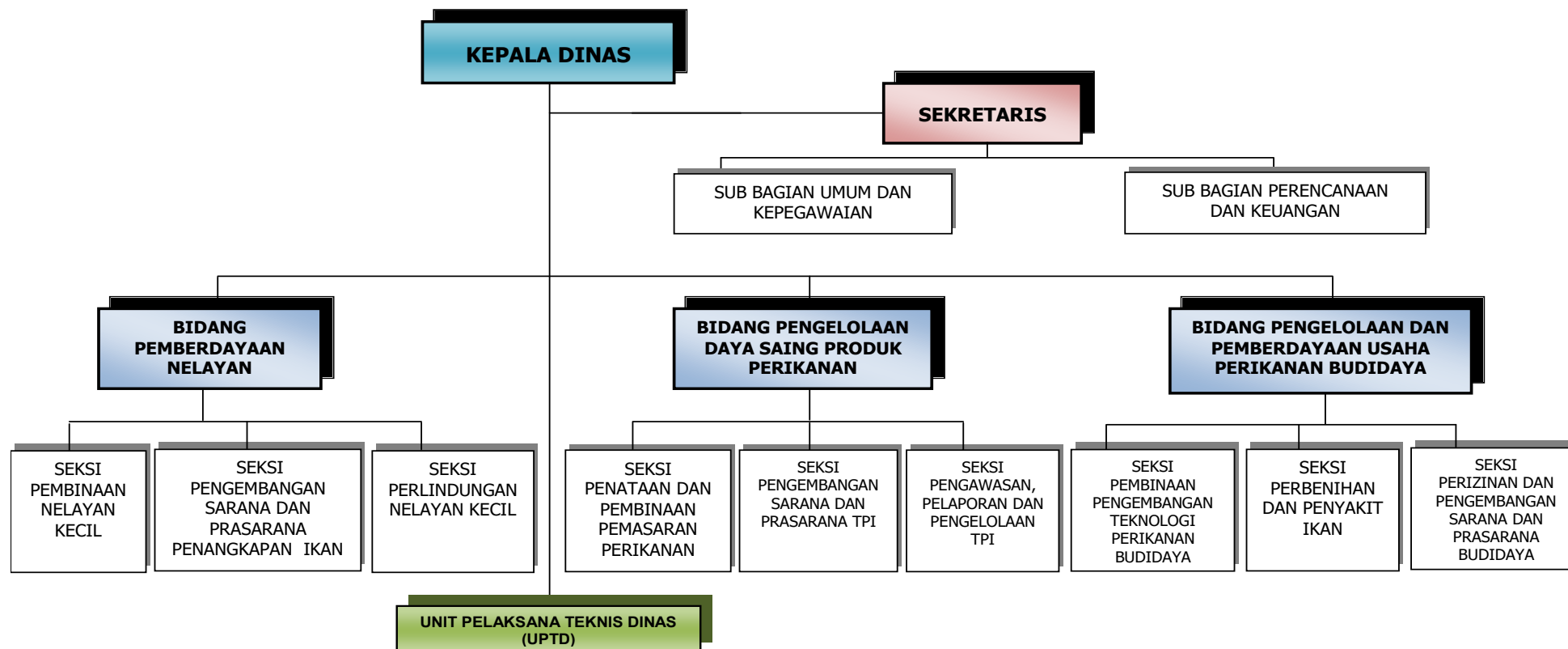
1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



GAMBAR I.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Tahun 2016 - 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah:

**"MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN"**

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik

bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

2.2. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan alat bantu dalam mengukur efektivitas dari kinerja sumberdaya manusia pada instansi bersangkutan.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang atau keinginan kedepan yang diharapkan. Adapun perumusan Visi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : **“Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan”**. Dari visi tersebut dapat diartikan bagaimana cara pandang atau keinginan serta harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam membangun dan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan kabupaten Natuna menjalankan Misi Bupati Kabupaten Natuna dalam

memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
3. Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat.

Kesatuan visi dan misi dalam pembangunan perikanan memang memerlukan suatu proses yang memakan waktu lama tapi sangatlah diperlukan agar tercapainya kesinambungan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Selain itu tujuan juga merupakan hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu atau jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan;

3. Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur serta hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang diharapkan untuk dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan;
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan;
3. Menigkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021.

Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang

akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna serta Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, dimana penjabaran dari tujuan secara terukur yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel II.1.

TABEL II.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	754,82	1.600,82	2.046,82	2.692,82	3.338,82	3.984,82	3.984,82
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	48.698,05	76.541,62	90.541,62	104.541,62	118.541,62	132.541,62	132.541,62
Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	90,07	109,93	119,86	129,79	139,72	149,65	149,65
Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg)	6.900.000	6.986.000	7.072.000	7.158.000	7.244.000	7.330.000	7.330.000
Nilai Tukar Nelayan (%)	N.a	100	100	100	100	100	100



TABEL. II.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	ALASAN PENGGUNAAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Total Pendapatan/ Pengeluaran (x) 100%	BPS Kab. Natuna
2.	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	2. Produktifitas Sektor Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Total Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya	Total Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2017.

2.4. Program Kerja dan Kegiatan

Secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2017 yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :



TABEL II.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	I. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Bulan	12
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Bulan	12
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Bulan	12
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor		Bulan	12
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bulan	12
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bulan	12
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bulan	12
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman		Bulan	12
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Bulan	12
	10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Bulan	12
	11. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah		Bulan	12
	II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Pembangunan Gedung Kantor		Unit	1
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	40
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	12
	4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		M ²	36



	III. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3. Meningkatnya Kemampuan, Kualitas dan Kinerja Aparatur	Bulan	12
	1. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur		Bulan	12
	IV. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	66
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Nilai	66
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	V. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	109,93
	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir		Kelpok	13
	VI. Pengembangan Budidaya Perikanan	2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.600,82
	1. Pengembangan BBIP			
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya			
	3. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)			
	VII. Pengembangan Perikanan Tangkap	3. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.541,62
	1. Penyusunan Study Kelayakan (<i>feasibility study</i>)		Ton	76.541,62
	2. Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap			
	3. Penyusunan Detail Engginer Design (DED)			
	4. Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL)			
	5. Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan Perikanan			
	6. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan			
	7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)			
3. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	VIII. Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan	%	100
	1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan			



TABEL II.4.
ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.678.589.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.920.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	234.996.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.800.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	145.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.936.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394.350.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	15.000.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	247.600.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	758.950.000
	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.143.200.000
	- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	543.837.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.432.188.000
	- Pembangunan Gedung Kantor	551.072.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	596.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	235.116.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000
	- Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur	150.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
5.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	575.505.000
	- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	575.505.000
6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.349.758.000
	- Pengembangan BBIP	1.073.908.000



	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya	2.232.100.000
	- Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	1.043.750.000
7.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.486.661.400
	- Penyusunan Study Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	241.500.000
	- Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	2.381.839.400
	- Penyusunan Detail Engginer Design (DED)	533.925.000
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL)	137.430.000
	- Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan Perikanan	241.320.000
	- Pelatihan Penangkapan/Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	244.376.000
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	1.706.271.000
8.	Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	287.700.000
	- Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	287.700.000
JUMLAH		16.010.401.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Tahun 2017 merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2017 telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 3 (tiga) Tujuan yang tercakup dalam 8 (delapan) Program yang tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 16,010,401,400,- (Enam Belas Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 yang mencakup 3 (tiga) sasaran strategis telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini :

MISI PERTAMA

Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah

Tujuan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan

Sasaran

Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 telah menetapkan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.541,62	86.141,74	112,54
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.600,82	2.743,64	171,39
3.	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	109,93	113,55	103,29

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dimana Produksi Perikanan Tangkap sebesar 112,54 % , Produksi Perikanan Budidaya sebesar 171,39 % dan Volume Produk Olahan Hasil Perikanan sebesar 103,29 %. Data tersebut merupakan laporan produksi dari setiap UPTD Dinas Perikanan dimana nelayan dan pembudidaya ketika akan melakukan penjualan hasil

tangkapan dan budidayanya melaporkan kepada UPTD, selain itu UPTD melakukan pengumpulan data dengan mendatangi tempat-tempat penjualan hasil nelayan dan pembudidaya.

Pembandingan yang dilakukan antara realisasi dengan target menunjukkan bahwa semua target dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini didapat melalui kerjasama yang baik dari semua pihak (stakeholder) yang terkait sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan berjalan dengan baik memberikan hasil baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produktivitas perikanan secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan persentase realisasi yang dicapai berada di atas 100 %. Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 telah menetapkan anggaran setiap program dan kegiatan. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 10.411.924.400,- atau 65,03 % dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.010.401.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.727.177.621,- atau 93,42 % dari jumlah anggaran yang tersedia. Hasil yang dicapai pada Tahun 2017 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 bisa dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2016 (%)	REALISASI 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Produksi Perikanan Tangkap	126,46	112,54
2.	Produksi Perikanan Budidaya	1.157,30	171,39
3.	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	83,13	103,29

Realisasi secara umum antara tahun 2016 dengan 2017 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan pencapaian target diatas 100 %

kecuali pada produksi perikanan budidaya terlihat pada tahun 2017 realisasinya mengalami penurunan persentase dibandingkan dengan tahun 2016, dimana hal ini disebabkan Benih rumput laut yang masih mengandalkan ketersediaannya di alam sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kualitas mutu yang seharusnya, sedangkan tempat pengeringan rumput laut masih terbatas karena tidak tersedianya dataran yang sesuai untuk dimanfaatkan karena topografi daerah yang cenderung berbukit. Permasalahan yang utama adalah pasca produksi atau pemasaran yang relatif harganya tidak stabil dan murah khususnya untuk produk rumput laut basah disebabkan permintaan pasar lebih kepada produksi rumput laut kering.

MISI KETIGA

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani

Tujuan

Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan

Sasaran

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 telah menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Tukar Nelayan	%	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dengan baik dimana Nilai Tukar Nelayan sebesar 100 %. Hal ini didapat melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan kelompok – kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi. Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 telah menetapkan anggaran setiap program dan kegiatan, adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 287.700.000,- atau 1,80 % dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.010.401.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.604.673,- atau 95,80 % dari jumlah anggaran yang tersedia. Realisasi yang dicapai pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2016 (%)	REALISASI 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Tukar Nelayan	100	100

Peningkatan ini dihasilkan melalui pembentukan kelompok masyarakat perikanan, pembentukan kelompok masyarakat ini bertujuan memperkuat produksi perikanan di Kabupaten Natuna. Pembentukan

kelompok – kelompok tersebut didukung dengan pemberian fasilitas bagi kegiatan perikanan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal inilah yang mampu meningkatkan persentase realisasi pada indikator kinerja sasaran tentang Nilai Tukar Nelayan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016.

MISI KEENAM

Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat

Tujuan

Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah

Sasaran

Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 telah menetapkan 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat/Nilai Akuntabilitas	B/66	B/66	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi sebesar 100 %. Data diperoleh dari pelaksanaan kegiatan rutin Dinas Perikanan. Adapun alokasi dana yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5.310.777.000,- atau 33,17 % dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16,010,401,400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.705.291.059,- atau 88,60 % dari jumlah anggaran yang tersedia.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat seimbang, data ini bisa dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2016 (%)	REALISASI 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Evaluasi LAKIP	100	100

Pada tahun 2016 dana yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.688.999.900,- atau 10,29 % dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26.120.264.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.644.611.078,- atau 98,35%, sedangkan pada tahun 2017 seperti yang telah diuraikan di atas dengan tingkat penyerapannya mencapai 88,67 %.

3.2. Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan

berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kabupaten Natuna menetapkan alokasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna seperti terlihat pada **tabel III.1.**

TABEL III.1.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
BERDASARKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN 2017

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT CAPAIAN (%)
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.336.262.007	2.315.637.900	20.624.107	99,12
2.	Tunjangan Keluarga	227.709.988	225.092.508	2.617.480	98,85
3.	Tunjangan Jabatan	211.640.450	205.495.000	6.145.450	97,10
4.	Tunjangan Beras	156.821.165	154.761.540	2.059.625	98,69
5.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,538,350	2,411,026	127,324	94.98
6.	Pembulatan Gaji	37,808	37,731	77	99.80
7.	Tunjangan Umum	80,173,800	79,960,000	213,800	99.73
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1,528,366,690	1,513,102,294	15,264,396	99.00



9.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	380,871,000	376,750,000	4,121,000	98.92
10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,925,000	-	1,925,000	-
TOTAL		4,926,346,258	4,873,247,999	53,098,259	98.92

B. BELANJA LANGSUNG

NO	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT CAPAIAN (%)
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.678.589.000	3.326.161.894	352.427.106	90,42
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.920.000	34.320.000	600.000	98,28
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	234.996.000	188.628.720	46.367.280	80,27
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.800.000	53.700.000	1.100.000	97,99
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	145.000.000	141.400.000	3.600.000	97,52
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.936.000	103.836.000	2.100.000	98,02
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394.350.000	369.723.000	24.627.000	93,76
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	12.530.000	2.470.000	83,53
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	247.600.000	156.047.000	91.553.000	63,02
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	758.950.000	752.830.274	6.119.726	99,19



	10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.143.200.000	976.702.600	166.497.400	85,44
	11. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	543.837.000	536.444.300	7.392.700	98,64
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.432.188.000	1.205.172.065	227.015.935	84,15
	1. Pembangunan Gedung Kantor	551.072.000	545.005.000	6.067.000	98,90
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	596.000.000	375.214.065	220.785.935	62,96
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	-	100
	4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	235.116.000	234.953.000	163.000	99,93
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000	148.147.100	1.852.900	98,76
	1. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur	150.000.000	148.147.100	1.852.900	98,76
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	25.810.000	24.190.000	51,62
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	25.810.000	24.190.000	51,62
5.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	575.505.000	404.694.143	170.810.857	70,32
	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	575.505.000	404.694.143	170.810.857	70,32
6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.349.758.000	4.119.309.729	230.448.271	94,70
	1. Pengembangan BBIP	1.073.908.000	963.857.500	110.050.500	89,75
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya	2.232.100.000	2.123.633.541	108.466.459	95,14



	3. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	1.043.750.000	1.031.818.688	11.931.312	98,86
7.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.486.661.400	5.203.173.749	283.487.651	94,83
	1. Penyusunan Study Kelayakan (<i>feasibility study</i>)	241.500.000	235.036.550	6.463.450	97,32
	2. Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	2.381.839.400	2.206.237.900	175.601.500	92,63
	3. Penyusunan Detail Engginer Design (DED)	533.925.000	518.528.750	15.396.250	97,12
	4. Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL)	137.430.000	113.763.449	23.666.551	82,78
	5. Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan Perikanan	241.320.000	233.788.400	7.531.600	96,88
	6. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	244.376.000	236.170.100	8.205.900	96,64
	7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	1.706.271.000	1.659.648.600	46.622.400	97,27
8.	Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	287.700.000	275.604.673	12.095.327	95,80
	1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	287.700.000	275.604.673	12.095.327	95,80
TOTAL		16.010.401.400	14.708.073.353	1.302.328.047	91,87

Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan misi dan sasaran strategis guna mencapai 3 (tiga) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017.

TABEL III.2.
ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN DANA
BERDASARKAN MISI DAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
MISI 1	Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah	10.411.924.400	9.727.177.621	93,42
Tujuan 1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	10.411.924.400	9.727.177.621	93,42
Sasaran 1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	10.411.924.400	9.727.177.621	93,42
MISI 3	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani	287.700.000	275.604.673	95,80
Tujuan 2	Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan	287.700.000	275.604.673	95,80
Sasaran 2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	287.700.000	275.604.673	95,80
MISI 6	Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat	5.310.777.000	4.705.291.059	88,60
Tujuan 3	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah	5.310.777.000	4.705.291.059	88,60
Sasaran 3	Menigkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	5.310.777.000	4.705.291.059	88,60
TOTAL		16.010.401.400	14.708.073.353	91,87

Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2017 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 3 (tiga) Tujuan yang tercakup dalam 8 (delapan) Program yang tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. Rp. 16,010,401,400,- (Enam Belas Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) hingga berakhirnya tahun anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. 14.708.073.353,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 91,87 % dan Belanja Tidak Langsung sebagai belanja penunjang kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebesar Rp. 4.926.346.258,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) adapun realisasinya sebesar Rp. 4.873.247.999,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,92 %.

Keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mencapai target - target yang telah ditentukan pada tahun 2017 merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai Dinas Perikanan. Pekerjaan yang dilakukan melalui manajemen yang baik yang diadakan oleh Dinas Perikanan merupakan faktor dasar yang sangat penting dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Faktor penting lainnya yang mendukung keberhasilan adalah dukungan dari stakeholder yang terkait seperti :

1. Pemerintah Kabupaten Natuna, memberikan kemudahan - kemudahan dalam melaksanakan kegiatan, pemberian dana yang memadai, maupun petunjuk - petunjuk pelaksanaan yang baik. Hal ini termasuk dukungan dari instansi - instansi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;



2. Pemerintah Pusat, berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Perikanan. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang sangat memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti Program PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung yang bersifat nasional. Selain pembangunan pelabuhan perikanan diluncurkan program peningkatan Budidaya Perikanan di Kabupaten Natuna serta Program Pendukung Pengolahan Hasil Perikanan. Program lain yang diluncurkan adalah pemberian kartu nelayan beserta pemberian asuransi nelayan bagi kalangan nelayan dengan tujuan memberikan ketenangan bagi nelayan maupun keluarganya dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga diharapkan hasil yang didapat berupa produksi perikanan dapat meningkat;
3. Para Penyuluh Perikanan, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan pembangunan tahun 2017.

Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perikanan untuk mewujudkan Visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari indikator sasaran yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna tahun 2017 untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp. 16,010,401,400,-. Dikaitkan dengan pencapaian sasaran yaitu **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan** menyerap



anggaran yakni Rp. 10.411.924.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.727.177.621,- atau 93,42 %, **Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan** menyerap anggaran yakni Rp. 287.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.604.673,- atau 95,80 %, dan **Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi** menyerap anggaran yakni Rp. 5.310.777.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.705.291.059,- atau 88,60 %. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna serta strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Secara umum target - target yang ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran berhasil direalisasikan, sehingga pencapaian sasaran bisa optimal. Rincian selengkapnya capaian kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis Tahun 2017 yang telah dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dibawah ini :

TABEL IV.1.
TINGKAT KINERJA KEUANGAN
BERDASARKAN LAPORAN ALIRAN KAS (CASH FLOW)
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	ANGGARAN			CAPAIAN (%)
	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tidak Langsung	4.926.346.258	4.873.247.999	53.098.259	98,92
Belanja Langsung	16,010,401,400	14.708.073.353	1.302.328.047	91,87
Jumlah	20.936.747.658	19.581.321.352	1.355.426.306	93,53



TABEL IV.2.
CAPAIAN KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN
MISI DAN SASARAN STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2017

MISI	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)
MISI PERTAMA Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan 1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	93,42
MISI KETIGA Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani	Tujuan 2: Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	95,80
MISI KEEMPAT Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat	Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah 3. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	88,60
NILAI RATA – RATA CAPAIAN KINERJA TAHUNAN		91,87

Mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 yang telah disusun, maka capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 91,87 % dan tingkat kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 93,53 %. Bila ditinjau dari klasifikasi

capaian kinerjanya maka capaian tahun 2017 tergolong dalam kategori "AA" atau "MEMUASKAN". Seluruh capaian kinerja telah berhasil sepenuhnya tercapai serta telah memberikan pelajaran yang berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ditahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang diikuti pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan berdaya guna;
2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Lebih meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna;
4. Agar Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan berbagai perbaikan terhadap pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya

sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**



SUHERMAN, SH
NIP. 19720317 200012 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SUHERMAN,SH**
Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN

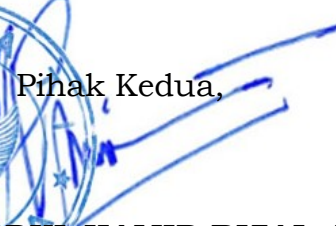
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

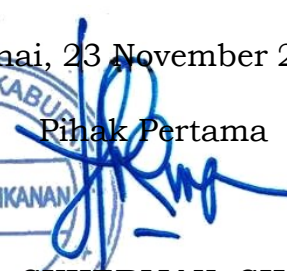
Nama : **Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si**
Jabatan : BUPATI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Ranai, 23 November 2017
Pihak Pertama

SUHERMAN, SH
NIP.19720317 200012 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERIKANAN**

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.541,62
2.	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.600,82
3.	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	109,93
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	%	100

Jumlah Anggaran :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	3.678.589.000.00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.432.188.000.00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	150.000.000.00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	50.000.000.00
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	5.486.661.400.00
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	575.505.000.00
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp.	4.349.758.000.00
- Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	Rp.	287.700.000.00
Jumlah	Rp.	16.010.401.400.00

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Ranai, 23 November 2017
Pihak Pertama

SUHERMAN, SH
NIP. 19720317 200012 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2017
DINAS PERIKANAN**

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	%
1.	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.541,62	112,54
2.	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.600,82	171,39
3.	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	109,93	103,29
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	%	100	100

Jumlah Anggaran :

<u>Program</u>		<u>Pagu</u>		<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	3.678.589.000.00	Rp.	3.326.161.894.00	90,42
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.432.188.000.00	Rp.	1.205.172.065.00	84,15
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	150.000.000.00	Rp.	148.147.100.00	98,76
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	50.000.000.00	Rp.	25.810.000.00	51,62



- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	5.486.661.400.00	Rp.	5.203.173.749.00	94,83
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	575.505.000.00	Rp.	404.694.143.00	70,32
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp.	4.349.758.000.00	Rp.	4.119.309.729.00	94,70
- Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	Rp.	287.700.000.00	Rp.	287.700.000.00	95,80

Jumlah	Rp.	16.010.401.400.00	Rp.	14.708.073.353.00	91,87
---------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------

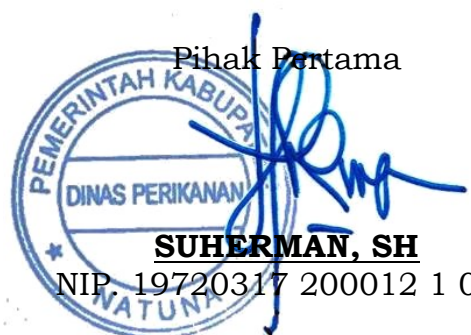
Ranai, 29 Desember 2017

Pihak Kedua,



Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama



SUHERMAN, SH
NIP. 19720317 200012 1 002